

AKUNTABILITAS KEUANGAN UMKM: STRATEGI PENGEMBANGAN UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Irfan Maulana¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

Jalan Rawamangun Muka Raya, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

^{1*} Irfan.maulana@mhs.unj.ac.id

Artikel Info

Artikel History:

Received Dec 13, 2024

Revised Dec 14, 2024

Accepted Dec 15, 2024

Keywords:

Akuntabilitas Keuangan
UMKM

Pertumbuhan Ekonomi

Cloud Computing

Literasi Keuangan

ABSTRAK

Akuntabilitas keuangan memiliki peran strategis dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas keuangan pada sektor UMKM dan mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam penerapannya. Menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian menganalisis berbagai literatur terkait pengelolaan keuangan UMKM. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala signifikan dalam akuntabilitas keuangan. Kurangnya literasi keuangan menjadi faktor utama, dengan data OJK (2022) menunjukkan kurang dari 40% UMKM memiliki catatan keuangan yang memadai. Tantangan utama meliputi pencatatan keuangan manual, keterbatasan pemahaman akuntansi, dan kesulitan mengakses pendanaan formal. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa akuntabilitas keuangan yang baik tidak hanya penting bagi kelangsungan usaha individual, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan literasi keuangan dan adopsi teknologi modern menjadi kunci utama dalam memberdayakan sektor UMKM di Indonesia.

Corresponding Author:

Irfan Maulana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

Jalan Rawamangun Muka Raya, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Email: Irfan.maulana@mhs.unj.ac.id

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang dirancang secara berkelanjutan dan berlandaskan pada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tentunya pembangunan nasional dilaksanakan oleh yang berkepentingan yaitu pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan, sedangkan pemerintah menjadi lembaga yang berwajib untuk dapat mengarahkan dan melindungi, serta mendorong pembangunan nasional (Setyawati, 2018).

Dalam pembangunan nasional, sektor ekonomi kerap dijadikan sebagai ukuran keberhasilan oleh pemerintah. Seperti yang dituliskan oleh Suparmoko (2020), salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut didasarkan pada pentingnya perekonomian dalam suatu negara, yang mana utamanya mampu meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat turut bertumbuh. Tinjauan dalam analisis makro ekonomi memberikan kejelasan bahwa tingkat pertumbuhan dari pendapatan perkapita menggambarkan perekonomian negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Setyawati, 2018).

Pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa, serta peluang kerja bagi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dan pemerintah harus memberikan dukungan mulai dari penyediaan kebijakan atau regulasi yang kondusif, investasi infrastruktur, akses pendanaan, serta berbagai macam program pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia (Suparmoko, 2020).

Usaha menjadi salah satu bentuk peran masyarakat dalam pembangunan nasional. Berbagai macam usaha dapat menjadi tonggak perekonomian masyarakat. salah satu bentuk usaha yang dikembangkan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan sebutan UMKM. Sofyan (2017) menyatakan bahwa UMKM merupakan bisnis atau usaha yang memiliki karakteristik khusus seperti tenaga kerja, aset, dan omset yang terbatas, namun memiliki fleksibilitas tinggi dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. UMKM sering menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia, di mana mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mengungkapkan perlunya untuk memperkuat UMKM sebagai strategi dalam meningkatkan inklusi ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan lapangan kerja (Yolanda, 2024). Dalam dokumen RPJMN tersebut, disebutkan bahwa penguatan UMKM dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan strategis, seperti pemberdayaan sumber daya manusia, akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, digitalisasi, dan peningkatan daya saing produk lokal. Data BPS (2023) memberikan kejelasan terkait dengan UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 60 juta. Ditambah dengan adanya digitalisasi seperti media sosial yang mampu memberikan akses jangkauan pasar yang lebih luas, UMKM dapat terus tumbuh dan terberdaya. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop telah menjadi sarana penting bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka secara nasional maupun internasional.

Namun, tantangan yang dihadapi UMKM dalam pengelolaan keuangan masih menjadi perhatian utama. Salah satu isu kritis adalah rendahnya tingkat akuntabilitas keuangan. Banyak UMKM belum menerapkan pencatatan keuangan yang memadai sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengevaluasi kinerja bisnis, mengakses pembiayaan, dan merancang strategi pengembangan usaha. Kurangnya literasi keuangan, terbatasnya sumber daya, dan minimnya pemahaman terhadap pentingnya akuntansi menjadi faktor utama penyebab masalah ini.

Akuntabilitas keuangan tidak hanya penting untuk memastikan kelangsungan usaha, tetapi juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing. Selain itu, akuntabilitas keuangan juga mampu mendorong pemerintah dan lembaga keuangan dalam memberikan dukungan yang lebih efektif, seperti akses kredit yang berbasis pada data keuangan yang valid. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pentingnya akuntabilitas keuangan pada sektor UMKM, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam penerapannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis tingkat akuntabilitas keuangan pada sektor UMKM. Subadi (2006) menyatakan bahwa studi kepustakaan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penelitian yang mana dilakukan dengan memperoleh informasi-informasi yang relevan dan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa studi kepustakaan valid dan sah digunakan dalam penelitian apabila sumber-sumber yang disajikan faktual dan dapat dibuktikan kebenarannya. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penggalan informasi kepustakaan yang berasal dari berbagai macam literatur, seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, skripsi, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas keuangan adalah salah satu pilar utama dalam keberhasilan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Konsep ini merujuk pada kemampuan pelaku usaha dalam melakukan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kondisi keuangan secara transparan dan akurat. Namun, telah diketahui bahwa UMKM di Indonesia masih melakukan praktik akuntabilitas keuangan dengan berbagai macam kendala.

Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami pentingnya pencatatan keuangan yang terstruktur dan rapih. Berdasarkan OJK (2022), kurang dari 40% UMKM di Indonesia memiliki catatan keuangan yang memadai. Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan ingatan atau pencatatan manual sederhana. Hal ini menjadikan pencatatan terkadang tidak akurat dan sering kali tidak mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya. Kondisi ini tentu menghambat kemampuan UMKM untuk mengevaluasi kinerja usaha, mengidentifikasi peluang perbaikan, serta mengakses pendanaan formal yang sering mensyaratkan dokumen keuangan yang valid.

Pada dasarnya, akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan penjelasan atas pelaksanaan tanggung jawab bagi pihak yang memercayakan sebuah tanggung jawab (Widyatama

& Yanida, 2016). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Widyatama & Yanida (2016) menunjukkan fakta bahwa pelaku UMKM belum memiliki pemahaman akan permasalahan laporan keuangan atas usaha yang sedang mereka jalankan. Sistem pencatatan laporan keuangan yang digunakan masih sangat konvensional. Bentuk catatan hanya bersisikan catatan keuntungan perhari, namun tidak memerhatikan bahwa pencatatan harus terekapitulasi selama satu periode (satu tahun) sebagai bahan evaluasi kinerja usaha.

Padahal, perlu diketahui bahwa laporan keuangan menjadi salah satu proses akuntansi yang mampu memberikan kejelasan informasi antara data keuangan dan aktivitas perusahaan. Laporan keuangan merupakan bahan pertimbangan atau mata rantai dalam proses pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM.

Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, tetapi juga sebagai dasar untuk mengevaluasi efisiensi operasional, menentukan strategi pengembangan, dan membangun kepercayaan dengan pihak eksternal, seperti investor atau lembaga keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2020), laporan keuangan yang memadai harus mencakup catatan arus kas, laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Elemen-elemen tersebut yang seharusnya dipahami oleh pelaku UMKM sebagai pengetahuan dalam pengembangan kondisi usaha mereka. Namun, kenyataannya banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara menyusun laporan keuangan secara sistematis. Faktor penyebab utamanya adalah kurangnya pendidikan terkait dengan akuntansi dan literasi keuangan bagi pelaku usaha kecil. Penelitian yang dilakukan oleh () mengungkapkan bahwa lebih dari 70% UMKM di Indonesia belum memiliki pelatihan formal terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

Tidak hanya itu, kurangnya perhatian terhadap pencatatan keuangan juga membuat UMKM kesulitan dalam mengakses pendanaan formal. Sebagai contoh, lembaga keuangan seperti bank sering mensyaratkan laporan keuangan yang terstruktur dan valid sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan kredit. Ketidaksiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan ini membuat mereka terpaksa bergantung pada pendanaan informal yang cenderung memiliki bunga tinggi dan risiko yang lebih besar. Hal tersebut akan mendatangkan permasalahan baru bagi para pelaku UMKM.

Berbagai macam strategi perlu diterapkan sebagai upaya untuk mendorong UMKM agar mampu mengelola akuntabilitas keuangan dengan baik dan bijak. Terlebih, dengan dorongan berbagai macam teknologi yang ada saat ini mampu memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengadopsi sistem pencatatan keuangan yang lebih modern dan efisien.

Salah satu strategi utama adalah pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Aplikasi akuntansi sederhana seperti BukuWarung, BukuKas, atau software berbasis cloud lainnya yang mampu membantu pelaku usaha untuk melakukan pencatatan keuangan harian, mengelola stok, serta membuat laporan keuangan secara otomatis. sistem informasi akuntansi berbasis Cloud Computing yang menjadi alternatif bagi pelaku usaha. Cloud Computing merupakan gabungan pemanfaatan antara teknologi dengan pengembangan internet. Cloud computing dapat mengurangi pembiayaan, meningkatkan kapasitas penyimpanan, serta fleksibel dalam proses penyimpanan datanya (Syahputra, et al, 2022). Dalam tulisannya, Ibrahim (2024) menyatakan bahwa teknologi cloud dapat memberikan

akses data keuangan secara real-time dari mana saja dengan bantuan koneksi internet. Dalam teknologi cloud tersebut juga memungkinkan untuk sebuah usaha menyimpan data keuangan secara aman di pusat data dengan keamanan yang terjamin.

Dengan berbagai macam keunggulan yang ditawarkan, sistem informasi akuntansi berbasis Cloud Computing telah menjadi solusi terbaik untuk mengatasi tantangan pelaporan keuangan pada UMKM. Teknologi tersebut memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan data keuangan secara otomatis, mengingat pentingnya pelaporan keuangan meskipun dalam usaha yang cenderung kecil. Dengan demikian, teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu UMKM dalam memenuhi standar pelaporan keuangan yang lebih baik dan profesional.

Disamping itu, diperlukan adanya bantuan dari pemerintah dalam memberikan insentif kepada UMKM yang menerapkan akuntabilitas keuangan. Insentif ini dapat berupa kemudahan akses kredit dengan bunga rendah, fasilitas pajak, atau penghargaan tertentu bagi UMKM yang berhasil menyusun laporan keuangan sesuai standar. Langkah seperti ini dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mulai memerhatikan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka.

Kesimpulan

Akuntabilitas keuangan pada sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, serta sistematis, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, dan memperluas akses ke sumber pendanaan formal. Akuntabilitas ini juga dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk investor dan lembaga keuangan.

Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM di Indonesia meliputi rendahnya literasi keuangan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan keuangan, dan minimnya akses terhadap teknologi modern yang mendukung pengelolaan keuangan. Banyak pelaku UMKM masih mengandalkan sistem pencatatan manual yang sederhana dan tidak memadai, sehingga menghambat kemampuan mereka dalam mengevaluasi kinerja usaha dan mengakses pendanaan formal. Perlu sebuah strategi baru untuk dapat mendorong akuntabilitas keuangan pada UMKM salah satunya adalah pemanfaatan teknologi berbasis Cloud Computing.

Referensi

- Ibrahim, F. (2024). Peningkatan Transparansi Keuangan : Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Cloud. *Jurnal Ilmu Data*, 4(3).
- Setyawati, I. (2018). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Perekonomian Nasional. *INA-Rxiv Papers*.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33-64.

- Subadi, T. 2006. Penelitian Kualitatif. Surakarta : Muhammadiyah University Press. 124 Halaman.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Penerbit Alfabeta. 346 hal.
- Sulistiyowati, Y. (2017). Pencatatan Pelaporan Keuangan Umkm (Study Kasus Di Kota Malang). Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, 5(2), 49-55.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 9(1), 39-50.
- Syahputra, H. E., Simanjuntak, O. D. P., Purba, R., & Zega, S. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Cloud Computing Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan. Jurnal Mutiara Akuntansi, 7(1), 58-69.
- Widyatama, A., & Yanida, M. (2016). Akuntabilitas Keuangan UMKM: Bagaimana Perspektif dari Sebuah UMKM Bidang Perdagangan?. Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen, 1(3), 202-210.
- Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 2(3), 170-186.